

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN
Volume 9 Nomor 1, Juli 2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi	iii
Lembar Abstrak	v - xxiv
Analisis Yuridis Pengaturan Upaya Hukum terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	
M. Nurfaik	1-20
Tinjauan Yuridis Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Bermakna Konstitusional Bersyarat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	
Yudarana Sukarno Putra	21-44
Dukungan optimalisasi layanan penyaluran delegasi masyarakat oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam Pelaksanaan Tugas DPR RI berdasarkan Pasal 72 Huruf G Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah	
Reny Amir	45-64
Analisis Yuridis Perubahan Penggolongan Narkotika untuk Ganja dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
Nita Ariyulinda	65-88
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menangani Terorisme Siber di Indonesia	
Muhammad Hasbi	89-112
Peran Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menurut Peraturan Perundang-undangan	
Imron Razali	113-134
Fungsi Pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu	
R. Muhamad Ibnu Mazjah	135-160
Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Lembaga-lembaga Pemerintahan yang Penting Diluar Konstitusi dalam Tataran Perundang-undangan	
Muamar Syafrudin	161-184
Tinjauan Kritis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
Dahiri	185-208

Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Etik Aparatur Sipil Negara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum <i>Muhammad Reza Baihaki dan Muhammad Raziv Barokah</i>	209-232
Analisis Tanggung Jawab Hukum Pengangkut pada Kecelakaan Pesawat Terbang dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan <i>Ryzzadharma Simatupang</i>	233-252
Panduan Penulisan Naskah	252-258

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 9 Nomor 1, Juli 2021. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan per-aturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 11 (sebelas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 11 (sebelas) tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Analisis yuridis pengaturan upaya hukum terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan; Kedua, Tinjauan Yuridis Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi bermakna konstitusional bersyarat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Ketiga, Dukungan optimalisasi layanan penyaluran delegasi masyarakat oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam Pelaksanaan Tugas DPR RI berdasarkan Pasal 72 Huruf G Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Keempat, Analisis Yuridis Perubahan Penggolongan Narkotika untuk Ganja dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Kelima, Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menangani Terorisme Siber di Indonesia; Keenam, Peran Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menurut peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Ketujuh, Fungsi Pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana terpadu; Kedelapan, Penguatan

kewenangan dan kelembagaan lembaga-lembaga pemerintahan yang penting diluar konstitusi dalam tataran perundang-undangan; Kesembilan, Tinjauan Kritis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Kesepuluh, Tinjauan Yuridis penjatuhan sanksi pelanggaran etik Aparatur Sipil Negara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Kesebelas, Analisis tanggung jawab hukum pengangkut pada kecelakaan pesawat terbang dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2021

Redaksi

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 9 NO. 1 JULI 2021

ISSN 2356-1105

Kata Kunci yang dcantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

M. Nurfaik

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis Pengaturan Upaya Hukum Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, halaman

UU tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode *omnibus law* banyak mengubah undang-undang termasuk UU tentang Persaingan Usaha. Salah satu substansi yang diubah dalam UU tentang Cipta Kerja yaitu mengenai upaya hukum terhadap Putusan KPPU. Pengaturan mengenai upaya hukum terhadap Putusan KPPU juga diatur dalam PP No. 44 Tahun 2021, PERMA No. 3 Tahun 2019 dan SEMA No. 1 Tahun 2021. Peraturan tersebut masih menimbulkan permasalahan terkait perbedaan pengaturan jangka waktu dalam upaya hukum terhadap Putusan KPPU. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji mengenai pengaturan upaya hukum terhadap Putusan KPPU serta legalitas pengaturannya ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Pada saat ini, pengaturan mengenai upaya hukum terhadap Putusan KPPU terdapat di beberapa peraturan yaitu UU tentang Cipta Kerja, PP No. 44 Tahun 2021, PERMA No. 3 Tahun 2019, dan SEMA No. 1 tahun 2021. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap Putusan KPPU belum mencerminkan asas kejelasan rumusan dan asas ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jangka waktu dalam upaya hukum terhadap Putusan KPPU perlu diperjelas rumusannya melalui revisi UU tentang Persaingan Usaha.

Kata kunci: upaya hukum, putusan kppu, pembentukan peraturan perundang-undangan

Legal Analysis on The Legal Effort Arrangements against the Commission for The Supervision of Business Competition Decision Reviewed from the Perspective of Legislative Drafting

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, page 1-20

Law on Job Creation which was formulated using the omnibus law method has changed many laws including Law on Business Competition. One of the substances amended in Law on Job Creation, that's regarding legal efforts against The Commission for The Supervision of Business Competition Decision. The legal effort arrangements against The Commission for The Supervision of Business Competition Decision are also regulated in Government Regulation Number 44 of 2021, Supreme Court Regulation Number 3 of 2019, and Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2021. The regulation still raises problems related to the regulation of the period for legal efforts against The Commission for The Supervision of Business Competition Decision. Based on these problems, the author will examine the legal effort arrangements against The Commission for The Supervision of Business Competition Decision and the legality of the regulation reviewed from the perspective of legislative drafting. This paper uses normative legal research methods by examining the legal literature or secondary data. At this time, the legal effort arrangements against The Commission for The Supervision of Business Competition Decision are contained in several regulations such as Law on Job Creation, Government Regulation Number 44 of 2021, Supreme Court Regulation Number 3 of 2019, and Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2021. Laws and regulations governing the legal efforts against The Commission for The Supervision of Business Competition Decision have not reflected the principles of clarity of formulation and the principles of order and legal certainty. Therefore, the regulation regarding the period of legal efforts against The Commission for The Supervision of Business Competition Decision needs to be clarified through the revision of Law on Business Competition.

Keywords: legal effort, the commission for the supervision of business competition decision, legislative drafting

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 9 NO. 1 JULI 2021

ISSN 2356-1105

Kata Kunci yang dcantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

Yudarana Sukarno Putra

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Tinjauan Yuridis Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Bermakna Konstitusional Bersyarat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, halaman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 7 Tahun 2020), merupakan produk hukum yang terbaru dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003). Sebagai undang-undang terbaru perubahan yang ada dalam undang-undang ini diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan yang ada selama ini salah satunya yakni mengenai dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang bermakna konstitusional bersyarat. Selama ini belum ada dasar kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan putusan semacam itu, maka timbul permasalahan yakni bagaimanakah UU No. 7 Tahun 2020 dapat menjadi dasar hukum pengenaan putusan yang bermakna konstitusional bersyarat, begitu juga bagaimanakah pelaksanaan selama ini, dan bagaimanakah solusi hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk kedepannya. Tujuan tulisan ini untuk mendapatkan jawaban dari sejumlah pertanyaan tersebut karena saat ini Mahkamah Konstitusi masih sering menerbitkan putusan konstitusional bersyarat. Metode penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulis mencoba menjawab permasalahan yang ada dengan pendekatan studi kepustakaan. Berdasarkan pembahasan diketahui bahwa UU No. 7 Tahun 2020 masih belum memiliki dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan putusan yang konstitusional bersyarat. Adapun bentuk putusan yang semacam ini pertama kali digunakan dalam Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk solusi kedepannya karena Indonesia menganut sistim *civil law* maka diperlukan adanya perubahan undang-undang. Untuk itu disimpulkan bahwa karena UU No. 7 Tahun 2020 belum memberikan dasar hukum yang cukup maka perlu kedepannya ada perubahan keempat dari UU No. 24 Tahun 2003.

Kata kunci: dasar hukum, civil law, putusan konstitusional bersyarat

Juridical Review a Legal Basis of the Conditional Constitutional of Constitutional Court Verdict Post Enactment of Law Number 7 Year 2020 about the Third Changes of Law Number 24 Year 2003 about the Constitutional Court

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, page 21-44

Law Number 7 Year 2020 about the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 about the Constitutional Court (Law No. 7 Year 2020), is the latest legal product of Law Number 24 of 2003 about the Constitutional Court (Law No. 24 Year 2003). As the latest law, the amendments to this law are expected to be able to improve the existing deficiencies, one of which is the legal basis for the Constitutional Court decisions which have a constitutional meaning. Since so far there has been no basis for authority for the Constitutional Court to issue such a decision, the problem arises, namely, what is Law No. 7 year 2020 can be the legal basis for the imposition of decisions that have constitutional meaning, as well as how has been the implementation so far, and what is the legal solution for the Constitutional Court in the future. The purpose of this paper is to obtain answers to a number of these questions because currently the Constitutional Court is still frequently issuing conditional constitutional decisions. This writing method is normative juridical. The author tries to answer the existing problems with a literature study approach. Based on the discussion it is known that Law no. 7 Year 2020 still does not have a legal basis for the Constitutional Court to issue decisions that are conditionally constitutional. This kind of decision was first used in the Constitutional Court Decision Number 058-059-060-063 / PUU-II / 2004 and 008 / PUU-III / 2005 regarding the review of Law Number 7 Year 2004 concerning Water Resources. For a solution in the future, because Indonesia adheres to a civil law system, it is necessary to change the law. For this reason, it is concluded that because of Law no. 7 Year 2020 has not provided a sufficient legal basis so it is necessary in the future there is a fourth amendment from Law no. 24 Year 2003.

Keywords: legal basis, civil law, conditional constitutional verdict

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 9 NO. 1 JULI 2021

ISSN 2356-1105

Kata Kunci yang dcantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

Reny Amir

Kepala Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat Biro Protokol
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dukungan Optimalisasi Layanan Penyaluran Delegasi Masyarakat oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam Pelaksanaan Tugas DPR RI Berdasarkan Pasal 72 Huruf G Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, halaman

Mekanisme pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan dalam suatu permasalahan. Salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi legislasi, membentuk UU. Materi muatan UU yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas tentu harus membuka masuknya aspirasi masyarakat agar menghasilkan suatu UU yang demokratis, aspiratif, dan partisipatif. Setjen DPR RI sebagai *supporting system* berfungsi memberikan dukungan pelaksanaan tugas DPR RI dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf g UU tentang MD3. Penulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana penyerapan aspirasi atau partisipasi masyarakat dalam bidang legislasi di DPR RI dan bagaimana upaya Setjen DPR RI sebagai *supporting system* mendukung DPR RI melaksanakan tugas menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf g UU tentang MD3. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyerapan aspirasi atau partisipasi masyarakat dalam bidang legislasi di DPR RI dan upaya Setjen DPR RI mendukung DPR RI melaksanakan tugas menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf g UU tentang MD3. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penyerapan aspirasi/partisipasi masyarakat dalam bidang legislasi di DPR RI dapat dilakukan pada tiga tahap pembentukan UU, yaitu pada tahap penyusunan, pembahasan, dan tahap pelaksanaan UU. Dukungan yang dilakukan Setjen DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI sesuai Pasal 72 huruf g UU tentang MD3 yaitu dengan mengoptimalkan layanan penyaluran delegasi masyarakat agar menjadi lebih efektif dan efisien dengan menghadirkan SILUGAS, yaitu program optimalisasi layanan penyaluran delegasi masyarakat berbasis elektronik.

Kata kunci: aspirasi masyarakat, legislasi, Sekretariat Jenderal DPR RI

Support of the Optimization of Community Delegation Distribution Services by the Secretariat General of the DPR RI In Implementing the Duties of the DPR RI Based on Article 72 Letters G MD3 Law

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, page 45-64

The mechanism for the formation of laws must be carried out in a transparent manner so that the public can participate. One of the functions of the DPR RI is the legislative function. The contents of the law which are aimed at the interests of the wider community must certainly open the entry of people's aspirations in order to produce a law that is democratic, aspirational and participatory. The Secretariat General of the DPR RI as a supporting system functions to provide support for the DPR RI's duties in absorbing, gathering, accommodating and following up people's aspirations as regulated in Article 72 letter g of the Law on MD3. This writing raises the issue of how to absorb people's aspirations or participation in legislation in the DPR RI and how the efforts of the Secretariat General to support the DPR RI in carrying out its task as regulated in Article 72 letter g of the Law on MD3. This paper aims to determine the absorption of people's aspirations or participation in the legislation and the efforts of the the Secretariat General to support the DPR RI in carrying out the task of absorbing, gathering, accommodating and following up on people's aspirations. This writing uses a normative juridical method with a statutory approach. The absorption of public aspirations/participation in the legislation can be carried out at three stages of law formation, namely at the drafting, deliberation, and implementation of the law. Meanwhile, the efforts made by the Secretariat General in optimizing the distribution of community delegation services to be more effective and efficient by presenting SILUGAS, which is an electronic-based community delegation service optimization program.

Keywords: people's aspirations, legislation, the Secretariat General of the DPR RI

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 9 NO. 1 JULI 2021

ISSN 2356-1105

Kata Kunci yang dcantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

Nita Ariyulinda

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis Perubahan Penggolongan Narkotika Untuk Ganja Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, halaman

Saat ini Komisi PBB untuk Narkotika telah mengambil keputusan mengeluarkan ganja dari golongan IV menjadi golongan 1 dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis. Di Indonesia, UU tentang Narkotika ganja masuk dalam golongan 1 yang artinya ganja hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan tidak dapat digunakan untuk terapi. Dengan adanya perubahan penggolongan narkotika dalam konvensi tersebut maka bagaimana dengan posisi ganja yang diatur dalam UU tentang Narkotika. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana perubahan penggolongan narkotika khususnya untuk ganja dari golongan IV ke golongan I dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 memengaruhi posisi ganja dalam UU tentang Narkotika dan apakah dengan perubahan tersebut UU tentang Narkotika masih sesuai atau tidak dengan kebutuhan hukum dan perkembangan zaman. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimana perubahan penggolongan narkotika untuk ganja dalam Konvensi Tunggal Narkotika memengaruhi terhadap penggolongan ganja dalam UU tentang Narkotika dan apakah dengan perubahan penggolongan Narkotika tersebut UU tentang Narkotika masih sesuai atau tidak dengan kebutuhan hukum dan perkembangan zaman. Metode penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka atau literatur sebagai bahan sekunder. UU tentang Narkotika mengatur bahwa perubahan penggolongan narkotika berdasarkan pada kesepakatan internasional dan kepentingan nasional. Kepentingan nasional artinya mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, yuridis dan karakteristik masyarakat Indonesia. Perubahan penggolongan narkotika dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 tidak serta merta memengaruhi penggolongan narkotika untuk ganja dalam UU tentang Narkotika karena harus mempertimbangkan juga dari aspek kepentingan nasional. Jika dilihat dari aspek kepentingan nasional maka UU tentang Narkotika masih sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan zaman.

Kata kunci: Narkotika, Ganja, Konvensi, UU tentang Narkotika

The Changes Of The Classification Of Narcotics For Marijuana In The Single Convention Of Narcotics 1961 On Law Number 35 Year 2009 Regarding Narcotics
Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, page 65-88

Currently, the United Nations Commission on Narcotics has decided to issue marijuana from group IV to group I in the 1961 Single Convention on Narcotics so that it can be used for medical purposes. In Indonesia, the Law on Narcotics marijuana is included in group 1, which means that marijuana can only be used for research purposes and cannot be used for therapy. With the change in the classification of narcotics in the convention, what about the position of marijuana as regulated in the Law on Narcotics. The problem in this paper is how the change in the classification of narcotics, especially for marijuana from group IV to group I in the 1961 Single Convention on Narcotics affects the position of marijuana in the Law on Narcotics and whether with these changes the Law on Narcotics is still in accordance with the legal needs and developments of the times. The purpose of writing is to find out how changes in the classification of narcotics for marijuana in the Single Convention on Narcotics affect the classification of marijuana in the Law on Narcotics and whether with the change in the classification of Narcotics, the Law on Narcotics is still in accordance with the legal needs and developments of the times. This writing method uses a normative juridical writing method with an approach to legislation and literature review or literature as secondary material. The Law on Narcotics stipulates that changes in the classification of narcotics are based on international agreements and national interests. National interest means considering the philosophical, sociological, juridical and characteristic aspects of Indonesian society. Changes in the classification of narcotics in the Single Convention on Narcotics 1961 do not necessarily affect the classification of narcotics for marijuana in the Law on Narcotics because they must also consider aspects of the national interest. When viewed from the aspect of national interest, the Law on Narcotics is still in accordance with legal needs and the times.

Keywords: Narcotics, Marijuana, Convention, Law on Narcotics

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 9 NO. 1 JULI 2021

ISSN 2356-1105

Kata Kunci yang dcantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

Muhammad Hasbi

Staf Ahli Anggota DPR RI

Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menangani Terorisme Siber di Indonesia

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, halaman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada saat ini masih dipergunakan untuk menangani semua persoalan hukum di dunia siber. Perkembangan dunia informasi melalui internet semakin hari semakin canggih termasuk potensi bahaya yang ditimbulkan. Salah satu bahaya yang perlu diwaspadai yakni mengenai adanya potensi terorisme siber. Terkait dengan permasalahan tersebut, tulisan ini menganalisis kegunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani terorisme siber. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam pembahasan akan diketahui bahwa ternyata begitu luas tantangan ke depan dalam dunia siber ini. Adapun mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebetulnya sudah terdapat sejumlah norma yang dapat digunakan untuk manangani terorisme siber. Hal yang lebih baik adalah bahkan dibentuk undang-undang khusus untuk itu. Pada akhirnya disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk saat ini dengan sejumlah norma yang ada masih mampu untuk menangani terorisme siber. Saran dari tulisan ini yakni perlu ada penguatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dapat lebih khusus menangani terorisme siber termasuk juga kalau dimungkinkan maka perlu dibentuk undang-undang khusus

Kata kunci: terorisme siber, teknologi informasi, transaksi elektronik

Analysis of the Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Electronic Transaction in Countering Cyber Terrorism in Indonesia

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, page 89-112

Law Number 11 Year 2008 concerning Information And Electronic Transaction at the moment there are used for handle all legal problem in the cyber world. The rise of the information via the internet like we know is getting sophisticated including the potential danger incurred. One danger to be aware of the potential cyber terrorism. Relating to these problems, this writing analyze uses of the Act Number 11 Year 2008 for Information And Electronic Transaction can be used to counter cyber terrorism. The purpose of this writing is to analyse whether the Act Number 11 Year 2008 for Information And Electronic Transaction can be used to counter cyber terrorism. This paper uses the normative legal research. In the discussion we will know that it was so extensively challenges ahead in this cyber world. But in the the Act Number 11 Year 2008 for Information And Electronic Transaction, were actually there are some norm that can be used to counter cyber terrorism. What is best is even formed a special act therefore. In end concluded that the the Act Number 11 Year 2008 for Information And Electronic Transaction for now with a norm still be able to counter cyber terrorism. The advice of this writing should be strengthening the Act Number 11 Year 2008 for Information And Electronic Transaction to be more specific countering cyber terrorism including if possible needs to be formed in a special act.

Keywords: cyberterrorism, information technology, electronic transaction

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 9 NO. 1 JULI 2021

ISSN 2356-1105

Kata Kunci yang dcantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

Imron Razali

Tenaga Ahli Anggota DPD RI

Peran Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, halaman

Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi ini menjadi persoalan yang mengemuka hingga saat ini karena seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat dan bukan wakil partai. Partai politik saat ini mendapatkan penilaian yang buruk hal ini berimbas juga ke penilaian lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi partai poltik. Karena fraksi wajib ada di Dewan Perwakilan Rakyat maka perlu ada analisis bagaimana sebetulnya peran fraksi selama ini di Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan analisis misalnya dalam hal legislasi fraksi memiliki peran memberikan usulan dalam penyusunan prolegna dan, menyampaikan pendapat mini pada akhir pembicaraan tingkat I pembahasan rancangan undanh-undang, Membahas fraksi memang tidak dapat dipisahkan dengan partai politik namun harus ada batasan yang tegas untuk kedepannya. Dapat dilakukan sebagai solusi yakni fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya diisi oleh 1 partai saja namun dapat juga diisi oleh beberapa partai. Hal ini akan berdampak kepada lebih mudahnya pengambilan keputusan karena jumlah fraksi yang cenderung sedikit.

Kata kunci: fraksi, peraturan perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat

The Role of Faction in the House of Representatives in the Statutory Regulations

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, page 113-134

Faction Is the extension of political party in The House of Representatives. This condition become a trouble that leak because The House of Representatives it supposed to be the representatives of the people not for the political party. Nowadays, political party get a bad persception by the people and that also react to the persception of The House of Representatives that containing political party. Because facsion is mandatory to The House of Representatives, therefore we must analyze the role so far in the house of representatives. An example analysis of faction in legislation process is like faction have an important role in the preparation of Law Agenda and provide a suggestions, faction also must have make an simple political party opinion in the discussion of making the law. Therefore when we discuss the faction we cannot separate it to the political party but must make a limitation for the future. We can make a solution like faction its not contain just one politcaly party, but it can be contain by two or more political party. That rule can make an affect in decision-making of The House of Representatives. It will make the decision-making job become easier because the number of faction is small.

Keywords: faction, statutory regulations, The House Of Representatives

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 9 NO. 1 JULI 2021

ISSN 2356-1105

Kata Kunci yang dcantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

R. Muhamad Ibnu Mazjah

Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Fungsi Pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, halaman

Tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku dan kinerja jaksa dan/atau pegawai kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) hakekatnya merupakan mandat peraturan perundang-undangan yang tak terpisahkan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang bertumpu kepada cita hukum ideal berdasarkan asas negara hukum dan asas negara demokrasi. Meski demikian, di dalam praktik perangkat norma tentang pengawasan terhadap perilaku dan kinerja jaksa di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 memuat aturan yang menimbulkan tafsir yang tidak koheren dengan cita hukum ideal dimaksud. Hal ini pada akhirnya berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan tugas KKRI. Untuk itu, penelitian ini mengajukan sebuah konsep tentang dimensi perilaku dan kinerja sebagai suatu diskursus di dalam pengembangan tugas KKRI. Perilaku digambarkan sebagai reaksi atau respons yang timbul akibat interaksi seseorang dengan lingkungannya baik dalam konteks pelaksanaan tugas maupun di luar tugas. Perilaku memiliki tiga domain yakni kognitif, afektif, dan psikomotor yang membentuk pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang dengan intensitas dan tingkatannya yang berbeda-beda. Adapun kinerja merupakan wujud nyata daripada perilaku dalam lingkup pelaksanaan tugas yang dibebankan atas dasar kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan tanggung jawab sesuai mekanisme hukum dan kode etik. Diskursus tentang dimensi perilaku dan kinerja ini disajikan dengan harapan memberi penguatan terhadap pengembangan tugas KKRI sebagai pelaksana fungsi penyeimbang atas pelaksanaan kewenangan negara oleh kejaksaan, sehingga tercipta suatu proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi etika, kebenaran, dan hak asasi manusia. Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif guna memberikan gagasan yang bersifat preskriptif atau sesuatu yang bersifat seyogianya melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Kata kunci : pengawasan, Komisi Kejaksaan, sistem peradilan pidana terpadu, perilaku, kinerja

Oversight Functions of the Commission of Prosecution of the Republic of Indonesia in the Integrated Criminal Justice System

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, page 135-160

Oversight by the Commission of Prosecution of The Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Commission) is essentially a statutory mandate that is inseparable from the objectives of the integrated criminal justice system within the framework of the rule of law. However, in practice, Presidential Regulation Number 18 of 2011 contains rules that create interpretations that are not coherent with the ideal legal ideals, so that it affects the effectiveness of the Commission's duties. For this reason, this study proposes a concept about the dimensions of behavior and performance as a discourse in carrying out the task of the Commission. Behavior that is described as a reaction or response that arises as a result of a person's interaction with his environment both in the context of carrying out tasks and outside the task. Behavior has three domains, namely cognitive, affective and psychomotor which shape a person's knowledge, attitudes and actions with different intensities and levels. The performance is a tangible manifestation of behavior in carrying out tasks that are imposed on the initial experience, experience, and responsibility according to legal mechanisms and codes of ethics. The discourse on the dimensions of behavior and performance is presented with the hope of providing reinforcement to the implementation of the Commission's duties as the executor of the balancing function, so as to create a law enforcement process that upholds ethics, truth and human right. This scientific writing uses a normative research method through a law approach and a conceptual approach.

Keywords: oversight, The Commission of Prosecution, Integrated Criminal Justice System, Behavior, Performance

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 9 NO. 1 JULI 2021

ISSN 2356-1105

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

Muamar Syafrudin
Staf Ombudsman RI

Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Lembaga-lembaga Pemerintahan yang Penting Diluar Konstitusi dalam Tataran Perundang-undangan

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, halaman

Kekuasaan negara haruslah diawasi untuk itu lahir lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi penting dalam pemerintahan. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebelum reformasi ditandai dengan praktik maladministrasi termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi pemerintah. Dalam rangka reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia, didirikan lembaga baru yang tidak pernah ada pada masa pemerintahan orde lama dan orde baru yang berkuasa sebelumnya. Salah satu lembaga baru adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sehingga dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini, terdapat 4 (empat) pilar kekuasaan yang berkedudukan setara, yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudisial dan Lembaga Negara Khusus yang terdiri dari BPK, Ombudsman, Komnas HAM dan KPK. Dengan metode penelitian normatif dan pendekatan konseptual dengan menjadikan Ombudsman sebagai obyek penelitian didapat temuan bahwa BPK, Ombudsman, Komnas HAM dan KPK yang termasuk dalam lembaga negara khusus diposisikan sejajar dengan Legislatif, Eksekutif dan Yudisial. Walaupun pengaturannya hanya didasarkan pada undang-undang. Lembaga pemerintahan yang ada saat ini peran dan fungsinya masih terbatas karena keterbatasan pengaturan yang ada saat ini dalam undang-undang untuk itu perlu ada penguatan dalam tataran undang-undang agar lembaga-lembaga ini dapat lebih berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: struktur ketatanegaraan, konstitusi, demokrasi, lembaga pemerintahan

Strengthening the Authority and Institutional of the Important Government Agencies Outside the Constitution by the Regulations)

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, page 161-184

The powers of the state has to watched by the state organ, these organ was born and have an essential function in the government The administration of the state and government before the reforms was marked by the practice of maladministration including corruption, collusion and nepotism (KKN), so that it was absolutely necessary to reform the government bureaucracy. In the framework of reforming the implementation of the state and government in Indonesia, some new institutions were established which had never existed during the reign of the old order and the new order that had been in power before. One of the new institutions is the Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI), so that in the current Indonesian constitutional practice, there are 4 (four) pillars of equal position, namely Executive, Legislative, Judicial and Special State Institutions consisting of BPK, Ombudsman, Komnas HAM and KPK. With normative research methods and conceptual approaches by taking the Ombudsman as the object of research obtained findings that the BPK, the Ombudsman, the National Human Rights Commission and the Corruption Eradication Commission included in the special state institutions are positioned parallel to the Legislative, Executive and Judicial. Although the settings are only based on the Act. Government agencies that exists when the role and functions of the remains limited because current in law therefore there should be a reinforcement in law to give this one institutions more of a role in the national and state life.

Keywords: constitutional structure, constitution, democracy, government agencies

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 9 NO. 1 JULI 2021

ISSN 2356-1105

Kata Kunci yang dcantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

Dahiri

Analisis APBN Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian DPR RI

**Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, halaman

Terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU tentang PLP2B) bertujuan untuk melindungi lahan-lahan pertanian khususnya lahan pangan pokok dari alih fungsi ke lahan nonpertanian. Meskipun UU tentang PLP2B telah cukup komprehensif mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berikut aturan turunannya, tetapi alih fungsi lahan masih tetap terjadi dengan laju alih fungsi lahan sebesar 96.512 hektar per tahun. Hal ini menunjukkan sinyalemen negatif terhadap pelaksanaan UU tentang PLP2B. Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan UU tentang PLP2B dan upaya meningkatkan peran UU tentang PLP2B untuk mengatasi alih fungsi lahan. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah insentif bagi pemerintah daerah tidak ada, insentif bagi petani tumpang tindih, dan belum ada kelembagaan dan besaran pembiayaan dalam kegiatan pengembangan ekstensifikasi. Untuk meningkatkan peran UU tentang PLP2B, maka upaya yang perlu dilakukan yaitu pertama, pemberian insentif bagi pemerintah daerah dengan dana alokasi khusus bidang pertanian. Kedua, insentif bagi petani PL2B dengan pemberian bantuan alat mesin pertanian prapanen dan pascapanen dan menjamin stabilitas harga dengan menyerap hasil hasil produksi petani. Ketiga, membentuk kelembagaan dalam kegiatan ekstensifikasi dan perhitungan besaran biaya ekstensifikasi menggunakan indeks kemahalan konstruksi.

Kata kunci: alih fungsi lahan, pertanian, insentif, ekstensifikasi.

Critical Review Of The Implementation Of Law Number 41 Of 2009 About Land Protection Sustainable Food Agriculture

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, page 185-208

The Establishment of Law Number 41 Year 2009 about land protection sustainable food agriculture (Law on land protection) have purpose protect agricultural lands, especially staple food lands, from conversion to non-agricultural land. Although the Law on land protection has been quite comprehensive in regulating the conversion of land functions for sustainable food agriculture and its derivative regulations, land conversion is still occurring with a land conversion rate of 96.512 hectares per year. This shows a negative signal towards the implementation of the Law on land protection. The purpose of this is to analyze the factors that influence the implementation of the Law on land protection and efforts to increase the role of the Law on land protection to address the land conversion. This paper is prepared using a normative and empirical juridical approach. The results showed that the influencing factors were the absence of incentives for local governments, overlapping incentives for farmers, and there was no institutional and amount of financing in extensification development activities. To increase the role of the Law on land protection, efforts that need to be made are first, providing incentives for local governments with special allocation funds in agriculture. Second, incentives for land protection sustainable food agriculture farmers by providing pre-harvest and post-harvest agricultural machine tools and ensuring price stability by absorbing farmers' products. Third, forming an institution for extensification activities and calculating the amount of the extensification fee using the Construction Expensive Index.

Keyword: land use change, agricultural, incentives, extensification.

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 9 NO. 1 JULI 2021

ISSN 2356-1105

Kata Kunci yang dcantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

Ryzzadharma Simatupang

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional

Analisis Tanggung Jawab Hukum Pengangkut pada Kecelakaan Pesawat Terbang dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, halaman

Pesawat terbang merupakan alat transportasi yang umum digunakan pada saat ini karena dianggap cepat dan aman. Adapun dasar hukum dari tingkatan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Selain memberikan kemudahan, ternyata transportasi udara masih memiliki kekurangan yakni terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Permasalahan yang timbul dari kecelakaan pesawat terbang yakni terkait tanggung jawab hukum pengangkut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui tanggung jawab hukum pengangkut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif yakni dengan pendekatan kepustakaan untuk mendalami isu mengenai hukum penerbangan ini. Hasil yang didapatkan yakni pengangkut memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada korban/ahli waris korban. Kesimpulannya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memiliki dasar hukum yang mengatur tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadi kecelakaan pesawat terbang.

Kata kunci: tanggung jawab hukum pengangkut, kecelakaan pesawat terbang, undang-undang tentang penerbangan

An Analysis Of Carrier's Legal Responsibility On A Airplane Accident From The Perspective Of The Law Number 1 Of 2009 About Aviation

Jurnal Prodigy Vol. 9 No. 1, Juli 2021, page 233-252

Airplanes are a common transportation that being used today because they are considered the fastest and safest. The legal basis of law about this is The Law Number 1 of 2009 about Aviation. Even though providing convenience, it turns out that air transportation still has a drawback such as the airplane accidents. The Problems that arise from airplane accidents are related to the carrier's legal responsibility in The Law Number 1 of 2009 about Aviation. The purpose of this paper is to determine the carrier's legal responsibility in Law Number 1 of 2009 about Aviation. The writing method used is normative juridical, namely with a library approach to explore this issue of aviation law. The results obtained are that the carrier has the responsibility to provide compensation for the victim or victim's heir. The Law Number 1 of 2009 about Aviation has a legal basis that regulates the carrier's responsibility in an airplane accident.

Keywords: carrier's legal responsibility, airplane accident, law about aviation